

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

Mufidatun Nafisah¹, Emy Kholifah R.²

¹ Universitas Muhammadiyah Jember; muslimmufidatun20@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jember; emykholifah@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber berikut: Pendamping PKH, Kasi Kesra Desa Cakru, dan keluarga penerima bantuan PKH (5 orang). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dengan menggunakan 5 (lima) indikator efektivitas program yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata, efektivitas PKH di Desa telah terlaksana baik dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah angka anak putus sekolah yang menurun, dapat memberikan manfaat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, tepat waktunya penyaluran bantuan, dan pengurangan jumlah penerima bantuan yang menurun cukup signifikan. Dalam pelaksanaannya PKH mengenai pemahaman program dan tepat sarasanya bantuan masih ditemukan permasalahan, yaitu keluarga penerima manfaat yang masih minim pengetahuan program, tidak tepatnya sasaran pendistribusian bantuan program, yang dengan ini tujuan dan perubahan nyata tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kedua, dalam tingkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Cakru diukur dari indikator kesejahteraan masyarakat sudah bisa dirasakan dari pengadaan Program Keluarga Harapan. Dalam tingkatan kesejahteraan masyarakat masih belum dirasakan secara merata dan tidak seimbang, karena dari tidak tepatnya sasaran bantuan program.

Keywords: Efektivitas, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.123>

*Correspondensi: Mufidatun Nafisah dan Emy Kholifah R.

Email: muslimmufidatun20@gmail.com,
emykholifah@unmuhjember.ac.id

Received: 02-11-2023

Accepted: 13-12-2023

Published: 27-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The aim of this research is to analyze and describe the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in efforts to improve community welfare in Cakru Village, Kencong District, Jember Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive research approach, and the data used in this research was collected from the following sources: PKH Facilitators, Head of Community Welfare of Cakru Village, and families who received PKH assistance (5 people). Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The research results show that first, by using 5 (five) indicators of program effectiveness, namely program understanding, right on target, on time, achievement of goals and real changes, the effectiveness of PKH in the Village has been implemented well and in accordance with the provisions of Ministerial Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning Family Hope Program. This can also be seen from the decreasing number of children dropping out of school, which can provide the benefit of reducing the expenditure burden on poor families, timely distribution of aid, and reducing the number of aid recipients which has decreased quite significantly. In the implementation of PKH regarding understanding the program and precisely targeting the assistance, problems were still found, namely the beneficiary families still had minimal knowledge of the program, the target distribution of program assistance was not precise, so that the real goals and changes were not felt evenly by the community. Second, the level of

welfare of the community receiving PKH assistance in Cakru Village, measured by indicators of community welfare, can be felt from the provision of the Family Hope Program. The level of community welfare is still not felt evenly and unequally, because of the inappropriate targeting of program assistance.

Keywords: *Effectiveness, Family Hope Program (PKH), Community Welfare*

Pendahuluan

Kemiskinan adalah fenomena kehidupan manusia yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Persoalan kemiskinan melibatkan banyak faktor, seperti sosial, budaya, dan politik, serta rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan keterampilan dan kemampuan untuk berusaha, kesulitan dalam mencari pekerjaan, PHK, dan cacat fisik. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Xiang, 2022). Tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang berakibat pada sulitnya produsen menjual barang dan jasa. Di bidang pendidikan, kemiskinan berdampak pada angka putus sekolah yang tinggi, kurangnya wawasan, keterampilan, dan pengetahuan yang layak. Di bidang kesehatan, kemiskinan meningkatkan risiko terkena penyakit dan kesehatan ibu hamil karena kekurangan gizi. Pengurangan angka kemiskinan menjadi penting dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Kaswanto, 2018). Masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dengan usaha dan bekerja keras. Program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan transfer uang bersyarat kepada masyarakat miskin. Tujuan dari PKH adalah memecahkan rantai kemiskinan antargenerasi dengan meningkatkan pendidikan anak-anak dan kualitas kesehatan/gizi. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga miskin, memudahkan akses pelayanan yang layak dalam pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan multidimensional (Lubis, 2018). Di Kabupaten Jember, PKH telah membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi program ini, seperti komunikasi yang tidak efektif antara PKH dan KPM, serta mekanisme pemrosesan data yang belum optimal. Dalam penelitian ini, tujuan PKH adalah untuk meningkatkan rasa aman masyarakat umum di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, dan Jember. Upaya untuk mencapai populasi yang bersejarah memerlukan mekanisme pemrosesan data yang lebih efektif dan peningkatan peran pendamping PKH dalam menyampaikan informasi tentang program kepada masyarakat penerima manfaat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurfia, 2019) dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan Di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul)" yang mendapatkan hasil bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yakni pada pendidikan sudah berjalan baik dengan hambatan yang dialami diantaranya, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah tersebut. Dan penelitian oleh (ARDA, 2022) dengan judul "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru (Studi Pada Bidang Pendidikan Di Nagari

Pangkalan Koto Baru) Sumatera Barat” mendapatkan hasil bahwa efektivitas PKH dalam indikator sasaran kurang baik, sosialisasi program sudah baik, tujuan program dan pemantauan program sudah cukup baik.

Metode

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mencari dan memahami gambaran bagaimana unsur-unsur pada fenomena masalah sosial dengan jelas yang dialami oleh subjek peneliti (Sugiyono, 2014).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Peneliti melakukan penelitian di Desa Cakru karena merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang mengikuti awal pengadaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum adanya pembahasan penelitian ini dan masih adanya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pada pemahaman program dan tepat sarasannya, serta kemudahan akses untuk memperoleh data. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2023.

Populasi, Sampel, Sampling

Populasi dalam penelitian ini melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, masyarakat penerima bantuan sosial PKH sebanyak 5 orang, dan Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra) Desa Cakru. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling yang mana teknik pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian meliputi: pertama, observasi dengan jenis observasi partisipan dengan melibatkan diri secara langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian dan guna memperoleh data informasi yang akurat, serta mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi. Kedua, wawancara secara terbuka (tidak terstruktur) dan tertulis agar informan dapat secara bebas menyampaikan pendapatnya, yang melalui komunikasi secara tanya jawab langsung dan mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga, dokumentasi untuk menghasilkan data yang didapatkan dari catatan penting berupa tulisan, gambar, hasil rekaman, catatan harian saat proses wawancara.

Sumber Data

Sumber data yang ditetapkan penelitian ini yaitu data primer yang bersumber dari informan yang telah dipilih dan paham akan penelitian yang peneliti lakukan. Dan data sekunder berupa data dari sumber penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema judul penelitian, data Badan Pusat Statistik (BPS), buku pedoman Program Keluarga Harapan (PKH), Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, jurnal, artikel ilmiah, data dari internet/media massa, dan arsip-arsip pendukung

yang berhubungan dengan penelitian ini (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, 2018).

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara dengan model wawancara tertulis dan terbuka.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Program (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cakru

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dengan salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program yang sudah berjalan baik akan melahirkan suatu perubahan nyata pada taraf kehidupan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno (Muin & Rosdiana, 2020) yang meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata (Feldman, 2018). Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, peneliti menggunakan indikator ukuran menurut Badan Pusat Statistik (Suryamin, 2015).

a. Pemahaman Program dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan

Pemahaman program adalah bentuk mengukur tingkat keberhasilan guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat atau pengetahuan masyarakat mengenai suatu program tersebut. Peneliti menemukan bahwa, dalam upaya memahami program pendamping PKH sebagai pihak utama dalam menjalankan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat, yaitu melalui sosialisasi, per-temuan kelompok, dan/atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang dilakukan oleh pendamping PKH secara teratur setiap bulan (Suka, 2020). Tujuan dari pertemuan kelompok ini dilakukan adalah sebagai proses peningkatan pengetahuan, pemahaman tentang pelaksanaan program, pemahaman tujuan program, manfaat program, pemahaman hak dan kewajiban sebagai KPM, pemahaman pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, selain itu dengan adanya pertemuan ini informasi program dapat diterima masyarakat dengan baik, sehingga dapat mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku masing-masing penerima bantuan PKH. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tentang Program Keluarga Harapan pasal 50 Tahun 2018.

Pertemuan kelompok ini dilakukan rutin di Desa Cakru setiap sebulan sekali dengan terbagi kelompok pertemuan setiap dusunnya oleh pendamping PKH (Turisno, 2021). Dalam setiap kelompok akan ditunjuk satu peserta yang nantinya menjadi

ketua kelompok dengan tujuan mempermudah pendamping dalam melakukan koordinasi ke KPM secara menyeluruh. Indikator pemahaman program untuk masyarakat penerima bantuan PKH didapatkan melalui kegiatan pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan rutin setiap satu bulan sekali oleh pendamping PKH tanggal 12. Dalam pertemuan ini selain sebagai metode pemaparan mengenai pemahaman PKH, pendamping juga memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga gizi bagi anak (Nouzari, 2019). Selain itu dengan adanya pertemuan kelompok, pendamping PKH dapat menerima keluhan atau kendala yang dialami KPM yang nantinya pendamping melaporkan kepada koordinator kecamatan atau dapat melaporkan langsung ke Dinas Sosial (Yang, 2020). Dan melalui pertemuan kelompok ini pendamping dapat melihat kondisi terbaru dari masing-masing KPM sebagai pelaporan data terbaru, untuk selanjutnya dapat data akan divalidasi dengan syarat KPM membawa KTP dan KK.

b. Tepat Sasaran pada Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan

Untuk melihat baik tidaknya pelaksanaan suatu program adalah dengan pencapaian ketepatan sasarnya. Diupayakan untuk mencapai tujuan yang mengarah ke tujuan lain dan memenuhi kriteria untuk mencapainya (Kurniadi, 2020). Seberapa tepat program didistribusikan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan cara untuk mengetahui seberapa sesuai program dengan tujuan tersebut. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tujuan program adalah untuk memastikan bahwa masyarakat, keluarga, atau individu yang telah dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH. Keluarga miskin dan rentan yang datanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data desa, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut informan ketepatan sasaran di wilayahnya sudah tepat kepada masyarakat kurang mampu dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH. Namun peneliti menemukan adanya perbedaan pernyataan dengan informan di atas bahwa ketepatan sasaran belum sepenuhnya tepat (Harini, 2020).

Masih adanya ketidaktepatan sasaran di Desa Cakru yang terletak di Dusun Tempuran. Dengan demikian indikator tepat sasaran program PKH dikatakan belum efektif karena informan mengetahui adanya penerima yang dapat dikatakan mampu, memiliki lahan sawah yang cukup luas, tempat tinggal dan kendaraan yang cukup mewah untuk dikatakan layak mendapatkan bantuan sosial PKH.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa indikator tepat sasaran PKH di Desa Cakru belum bisa dikatakan efektif, karena dari empat dusun di Desa Cakru ditemukan masih adanya dua dusun yaitu, Dusun Tempuran dan Dusun Gondangrejo yang terdapat KPM yang tidak sesuai dengan kriteria sasaran bantuan PKH (Garza, 2018). Ketidaktepatan sasaran diakibatkan karena beberapa faktor, yang pertama

kurangnya kesadaran dari masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tetapi masih menerima bantuan PKH, yang hal ini dapat terjadi karena mereka yang tidak mengikuti kegiatan P2K2 dimana dalam pertemuan kelompok KPM akan mendapatkan penjelasan program dan sekaligus data KPM dapat diverifikasi oleh pendamping. Selain itu, ada ketidakcocokan antara data pusat dan data dilapangan yang menyebabkan data tidak valid (Purwowibowo, 2023). Akibatnya, aplikasi e-PKH tidak berfungsi karena pandemi COVID-19 tahun 2020, yang membuat peraturan berubah, yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat berfungsi, dan peneliti juga menyimpulkan bahwa kurangnya sanksi dan kurang tegasnya dari pendamping PKH untuk KPM yang tidak mengikuti P2K2 dan KPM yang tidak sesuai kriteria untuk dilakukan Graduasi alamiah atau yang dimaksud berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pada pasal 56 ayat (2) Graduasi alamiah adalah tahap berakhirnya kepesertaan KPM akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran PKH di Desa Cakru belum bisa dikatakan efektif karena masih adanya KPM yang tidak sesuai kriteria dan adanya keluarga yang sesuai kriteria tidak termasuk dalam penerima bantuan PKH.

c. Ketepatan Waktu Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan suatu program pentingnya untuk memperhatikan dalam menentukan jadwal pelaksanaan yang sesuai dan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam suatu program sangat krusial untuk mencapai keberhasilan tujuan yang akan dicapai. Indikator efektivitas pada ketepatan waktu, adalah penggunaan waktu saat mendistribusikan program yang ditargetkan kepada mereka yang menjalankan dan menerapkan program yaitu lembaga atau pemerintah, untuk nantinya membuat lembaga atau pemerintah harus lebih siap dan sigap melaksanakan atau menjalankan program (Ooms, 2019). Oleh karena itu, tepat waktu sangat penting untuk setiap program agar berfungsi dengan baik. Ini karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) setiap tiga bulan sekali setahun. Pemerintah, termasuk Dinas Sosial dan pemangku kepentingan lainnya, harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing untuk memastikan bantuan, terutama untuk Program Keluarga Harapan, dapat diberikan dengan efektif dan efisien (Kusumah, 2022).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa selama ini ketepatan waktu dalam pencairan Program Keluarga Harapan di Desa Cakru sudah berjalan dengan baik dan sesuai jadwal, yaitu dilakukan dalam 4 kali pencairan per tiga bulan dalam satu tahunnya, meskipun tanggal pencairan dana yang tidak menentu dan pernah ada keterlambatan karena faktor pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu.

Di Desa Cakru, dana untuk Jadwal distribusi Program Keluarga Harapan tidak berjalan sesuai rencana (Manero-Rupérez, 2020). Dana didistribusikan setiap tiga bulan sekali setahun dalam empat tahap: periode Januari hingga Maret 2023, periode April hingga Juni 2023, periode tiga bulan Juli hingga September, dan periode empat

bulan Oktober hingga Desember 2023. Dengan ketepatan waktu yang sesuai jadwal dalam pelaksanaan penyaluran dari PKH, maka pelaksanaan penyaluran bantuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan fakta tanggal pencairan yang tidak menentu dan adanya ketidaktepatan waktu pernah terjadi pada tahun 2020 yang dikarenakan dampak pandemi Covid-19, namun dari kasus tersebut KPM tidak merasa terganggu dan tidak dapat dipungkiri penyaluran bantuan PKH sejak awal penyaluran sudah berjalan baik dan tepat waktu (Sidabutar, 2021). Oleh karena itu, indikator tepat waktu yang digunakan untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cakru dapat dianggap efektif, seperti yang ditunjukkan oleh hasil wawancara yang disebutkan di atas.

d. Tercapainya Tujuan dari Program Keluarga Harapan

Indikator tercapainya tujuan ini adalah cara untuk mengukur seberapa dekat tujuan dengan tujuan awal program. Tercapainya tujuan dalam hal ini dimaksudkan adalah upaya memenuhi target sasaran yang harus dicapai oleh lembaga atau pemerintah sebagai pelaksana. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga KPM melalui akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, dan mengubah perilaku dan kemandirian keluarga KPM.

Tujuan utama kegiatan Program Keluarga Harapan di Desa Cakru, Kecamatan Kencong, adalah meningkatkan tingkat prestasi akademik anak-anak usia sekolah, yang sesuai dengan pernyataan misi PKH. Masyarakat penerima manfaat merasa terbantu mengurangi pengeluaran keluarga dengan adanya bantuan PKH. Sebagai hasil dari pengamatan mereka, para peneliti juga menemukan fakta bahwa kehidupan anak-anak KPM lebih sesuai dengan kehidupan mereka sendiri dalam hal kemampuan mereka untuk menghadiri sekolah sampai mereka mencapai tingkat yang lebih menantang dan menerima pekerjaan yang lebih menguntungkan (Aminudin, 2018). Meningkatkan kualitas hidup bagi orang tua dan orang-orang dengan cacat juga membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Di Desa Cakru, ada penurunan penerima manfaat PKH; sebelumnya, jumlah penerima sebanyak 238 KPM, tetapi data terbaru menunjukkan bahwa pengadaan Program Keluarga Harapan telah mengurangi tingkat kemiskinan. Dan bentuk pengakhiran dari kepesertaan bantuan PKH ini adalah melalui kegiatan Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) dimana dalam kegiatan ini dibedakan menjadi tiga macam kategori GSM, yaitu (1) Graduasi alami adalah pengakhiran KPM yang sudah tidak termasuk dalam kriteria penerima bantuan PKH, (2) Graduasi sistem, pengakhiran KPM yang telah meninggal dunia, dan (3) Graduasi sejahtera, yaitu dilihat dari kondisi KPM yang sudah berkembang dari hasil usahanya untuk menjadi sejahtera dan mandiri untuk menghidupi kehidupannya (Saharuddin, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) membantu pendidikan, meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan meningkatkan sumber daya manusia. PKH juga telah membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga KPM dan meningkatkan sumber daya manusia mereka. Berdasarkan hasil wawancara diatas juga menunjukkan penurunan jumlah KPM yang dari awalnya penerima sebanyak 238 KPM dan berdasarkan data terbaru 150 KPM (Emery, 2019). Namun terlepas dari tercapainya tujuan dalam penurunan angka data penerima bantuan PKH, dan pernyataan KPM diatas dapat membantu dalam pembiayaan pendidikan, kesejahteraan sosial, mengurangi pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapat keluarga, menurunkan angka anak putus sekolah, serta mampu meningkatkan sumber daya manusia. Ditinjau kembali bahwa adanya ketidaktepatan sasaran dari penerima KPM yaitu penerima yang tidak sesuai kriteria program (keluarga miskin) dan adanya KPM yang belum terdata sebagai penerima karena mereka layak menjadi peserta. Jadi hal ini indikator tercapainya tujuan ini belum dapat dikatakan efektif karena terukur dari sasaran pendistribusian bantuan PKH belum sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

e. Perubahan Nyata Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan

Perubahan nyata adalah bentuk sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan program yang dirasakan oleh seseorang/kelompok. Indikator perubahan nyata merupakan suatu langkah untuk mengukur sejauh mana dampak atau efek perubahan pada masyarakat yang ikut serta dalam program (Untung, 2021). Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih mandiri melalui akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, menurunkan angka kemiskinan, dan mempromosikan produk dan jasa keuangan. Beberapa laporan dari orang-orang yang menerima hibah dari Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa perubahan yang dibuat saat mereka menerima hibahan membantu menstabilkan beban pengeluaran (atap di atas kepala mereka) rumah mereka, terutama pembiayaan keluarga penerima manfaat (Rulloh, 2020). Akibatnya, indikator efektivitas perubahan dapat ditentukan oleh hasil pengamatan dan umpan balik dari informan.

Adapun kondisi Desa Cakru sebelum adanya bantuan PKH ini masyarakat Desa Cakru banyak yang berada dalam kemiskinan, pengeluaran keluarga yang tidak bisa dikendalikan bagi keluarga miskin, ban-yaknya angka putus sekolah, dan kesejahteraan masyarakat yang masih minim. Setelah implementasi pro-gram PKH di bidang kemiskinan pencegahan dan peningkatan standar SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat miskin berdasarkan data angka penerimaan PKH 2007 hingga 2023 penurunan terlihat cukup banyak yang mulanya 238 jiwa penerima bantuan, dan berdasarkan data terbaru penerima bantuan PKH sebanyak 150 jiwa.

Ditinjau kembali pada indikator tepat sasaran yang mengalami hambatan akibat adanya ketidaksesuaian target sasaran dengan kriteria program membuat mereka yang sudah mampu semakin makmur sejahtera dan mereka yang miskin akibat tidak termasuk dalam data penerima bantuan PKH membuat kehidupan yang sejahtera tidak dirasakan, yang dalam hal ini karena mekanisme pemutakhiran data (e-PKH) tidak dapat dioperasikan lagi. Dan pemahaman program yang minim membuat penyampaian pelaksanaan program saat kegiatan P2K2 dilaksanakan tidak merata karena adanya KPM yang tidak mengikuti pertemuan dan tidak tertibnya KPM saat pertemuan kelompok berlangsung. Dari kurang maksimalnya pertemuan kelompok ini juga membuat validasi data oleh pendamping PKH kurang menyeluruh (Jiang, 2022). Hal ini peneliti menyimpulkan dikarenakan kurang tegasnya pendamping, komunikasi yang kurang baik antara pendamping, ketua kelompok dan KPM yang lain, serta pemberian sanksi kepada KPM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai penerima PKH.

Kesimpulannya jika diukur dari 5 indikator efektivitas program menurut Sutrisno dalam (Muin & Rosdiana, 2020) di atas, Selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, penulis mengamati hambatan yang hadir di lapangan. Karena kurangnya pemahaman tentang program oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kurangnya sasaran yang berorientasi target, komunikasi yang buruk, kurangnya sanksi ke KPM, kesulitan menyelesaikan proses pengumpulan data untuk penerima bantuan, dan isu-isu lainnya, pelaksanaan PKH di Desa Cakru tidak dapat dianggap efektif dari data dan pengamatan yang tersedia.

Hambatan dalam pelaksanaan Program (PKH) di Desa Cakru

a. Kurangnya Pemahaman Program dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan

Pemahaman Program adalah metode untuk membantu masyarakat umum memahami tingkat pemahaman atau pengertian yang baik dari pelaksanaan program yang diperoleh melalui proyek yang melibatkan semua aspek kehidupan rutin atau sosialisasi yang disponsori oleh PKH. Sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Hanif sebelumnya, perwakilan pendamping PKH menyatakan bahwa pendamping sudah mulai bersosialisasi melalui 12 jam per minggu, setiap minggu, rutin kelompok, dan bahwa dari ini, pendamping telah memberikan informasi tentang Program Keluarga Harapan. Menurut hasil survei yang dilakukan di kantor penulis, beberapa anggota masyarakat umum yang mencari manfaat tidak diketahui tentang Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Karsupin hambatan yang dialami oleh Ibu Karsupin tentang pemahaman program, peneliti dapat menyimpulkan dari hasil pernyataan pendamping dan analisis dari peneliti bahwa hambatan terjadi pertama karena KPM merupakan peserta baru yang belum masuk ke grup whatsapp kelompok dan masih kurangnya komunikasi antara ketua kelompok dengan peserta

KPM dan kurang tegasnya pendamping kepada peserta PKH dengan baik. Sementara hambatan yang dialami Ibu Iswati disebabkan karena kesadaran diri dari KPM itu sendiri untuk memperhatikan materi dan tertib selama mengikuti pertemuan kelompok yang mengakibatkan sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping PKH tidak tersalurkan dengan maksimal. Mulai dari titik ini, alasan validasi data oleh pendamping PKH harus lebih jelas ketika memberikan informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Program Keluarga Harapan (PKH), yang juga memudahkan pendamping untuk validasikan data.

b. Tidak Tepatnya Sasaran Pendistribusian pada Bantuan Program Keluarga Harapan

Menurut peneliti, indikator ketepatan sasaran dalam keberhasilan Program Keluarga Harapan di Desa Cakru adalah bahwa masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum sepenuhnya terdistribusikan. Menurut Ibu Karsupin, penerima bantuan PKH, ini karena masih ada KPM yang tidak memenuhi kriteria sebagai PKH. Dari permasalahan diatas peneliti mendapatkan data dari wawancara kepada Bapak Hanif selaku pendamping PKH di Desa Cakru mengenai hambatan bahwa ketidaktepatan sasaran terjadi dikarenakan beberapa faktor, yang pertama karena kurangnya kesadaran dari KPM yang seharusnya keluarga dari peserta tetapi masih menerima bantuan, kedua karena data dari desa dan pusat tidak sesuai yang kemudian data dobel atau tidak sesuai dengan data dilapangan.

Kemudian pendataan komponen kesehatan khususnya untuk ibu hamil masih belum maksimal karena tidak adanya pelaporan dari KPM. Selanjutnya karena mekanisme untuk pemutakhiran, validasi, dan verifikasi data mengalami hambatan akibat tidak beroprasinya aplikasi e-PKH sejak terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 mengakibatkan mekanisme pembaharuan data tidak bisa berjalan efektif dan efisien. Namun dari pendamping sendiri sedang berusaha melakukan pemutakhiran data secara manual melalui data dari hasil sensus, dari kondisi rumah KPM yang sudah terstiker sebagai keluarga penerima bansos dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya pendataan mengandalakan kepadanan dari data Dispendukcapil dimana KK dan KTP harus terbaru. Selain itu melakukan pemantauan data pokok pendidikan (Dapodik) di sekolah-sekolah pada bidang pendidikan, pendataan KPM yang sudah meninggal, dan untuk data KPM dengan kategori kesehatan untuk ibu hamil dan anak serta kesejahteraan sosial masih belum terdata dengan baik. Dan perlunya ketegasan baik pemerintah dan pendamping PKH kepada masyarakat yang sudah tidak termasuk kriteria peserta PKH untuk keluar dan ketegasan kepada KPM yang tidak melakukan kewajiban sesuai amanat Permensos untuk diberlakukannya sanksi. Dengan demikian, meskipun indikator pencapaian tujuan dan perubahan nyata berjalan dengan baik, indikator pencapaian tujuan dan perubahan nyata juga tidak berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan

PKH dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Cakru

Kesejahteraan adalah kondisi dimana kehidupan yang mencakup kesehatan, ekonomi, kemudahan mengakses pendidikan, dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan, pakaian, dan perumahan. Pentingnya menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan adalah bentuk untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, seimbang dan memadai. Untuk mewujudkan suatu kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memberikan efek atas hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh lembaga dan/atau pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembang kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan salah satunya dalam bentuk program perlindungan sosial. Sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 14 perlindungan sosial dilakukan untuk mencegah dan menangani adanya risiko guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidup mereka dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, 2009).

Pengadaan program perlindungan sosial perlu dilakukan mengingat untuk mencapai suatu kesejahteraan, khususnya bagi keluarga kurang mampu tidaklah mudah dicapai, karena melihat kondisi perekonomian mereka yang rendah untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang layak perlunya campur tangan dari pemerintah sebagai penunjang kesejahteraan setiap masyarakat yang ada. Program perlindungan sosial yang dikhususkan pada penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat berupa uang kepada masyarakat miskin dan rentan terhadap risiko sosial yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan taraf kehidupan melalui akses layanan dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, penanganan guna mengurangi angka kemiskinan serta kesenjangan.

Dengan pengertian kesejahteraan masyarakat yang begitu luas, peneliti secara khusus berfokus mengukur kesejahteraan masyarakat dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) melalui indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS ;2015) yang terdiri dari 5 (lima) komponen ukuran yaitu; pengeluaran dan konsumsi, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan.

Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cakru dari indikator pengukuran efektivitas program. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menyatakan pelaksanaan PKH di Desa Cakru dapat memberikan manfaat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga, yang khususnya untuk memenuhi pembiayaan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sejak dijalkannya PKH di Desa Cakru pada tahun 2007, telah mengurangi angka putus sekolah bagi anak-anak KPM. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari data pendamping PKH jumlah penerima bantuan sosial tiap tahunnya berkurang. Awal jumlah KPM di Desa Cakru sebanyak 238 jiwa dan dari data terbaru 150 jiwa. Namun dari tingkat keberhasilan berdasarkan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam (Muin & Rosdiana, 2020) diatas, peneliti belum bisa mengatakan pelaksanaan PKH di Desa Cakru efektif. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan bahwa tujuan PKH tidak terlaksana dengan baik karena pemahaman mengenai program dari KPM tidak tersalurkan secara menyeluruh yang akibatnya masyarakat tidak sepenuhnya paham dari tujuan kegiatan program tersebut. Berikutnya dikarenakan adanya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, hal ini dikarenakan mekanisme pengelolaan data tidak maksimal dan kurang tegasnya pendamping dalam mengkoordinasi KPM yang tidak sesuai dengan kriteria syarat KPM program. Selain adanya keluarga termasuk dalam kriteria penerima belum terdata sebagai KPM, yang karena hal tersebut membuat ketidaktepatan data.

Adanya pengadaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat di Desa Cakru. Dari indikator kesejahteraan masyarakat dari Badan Pusat Statistik (BPS ;2015) tentang kesejahteraan masyarakat yang memiliki indikator pengukuran keberhasilan yaitu pengeluaran dan konsumsi, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan. Indikator pengeluaran dan konsumsi dari KPM dengan adanya PKH dapat dikatakan tidak efektif dibuktikan dengan adanya KPM yang tidak tepat sasaran, dimana mereka yang sudah mampu namun masih terdata sebagai penerima, dan adanya masyarakat yang sesuai kriteria tidak termasuk dalam target sasaran program, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yakni PKH adalah program yang memberikan bantuan sosial bersyarat untuk keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, namun bagi KPM yang sesuai dengan kriteria dari hasil penelitian di atas dapat membantu mengurangi pengeluaran dan peningkatan konsumsi KPM lebih sejahtera. Indikator keadaan tempat tinggal dari KPM dengan adanya PKH dapat dikatakan belum efektif jika dilihat dari kesejahteraannya karena dari hasil persentase dari 150 KPM sebanyak 80% keadaan tempat tinggal masih semi permanen, bahkan adanya tempat tinggal yang termasuk tidak layak huni. Akan tetapi jika dikaitkan dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yakni sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan. Dan 20% keadaan tempat tinggal KPM termasuk kategori mewah yang seharusnya tidak termasuk KPM, keadaan ini dikarenakan ketidaktepatan sasaran dan kurang tegasnya pendamping untuk memberikan sanksi kepada KPM yang tidak sesuai tujuan program.

Indikator kesehatan anggota keluarga dapat dikatakan bagus/efektif bagi KPM karena dengan adanya PKH mereka dapat bimbingan mengenai kesehatan oleh pendamping PKH. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan pada KPM dapat dikatakan cukup efektif, karena dibuktikan dengan masyarakat yang masih perlu ke desa lain untuk pembelian obat-obatan di apotik. Hal ini tidak sepenuhnya efektif dengan tujuan PKH berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yakni meningkatkan taraf hidup melalui akses pelayanan kesehatan. Dan terakhir indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan oleh KPM dimana dengan adanya PKH masyarakat khususnya penerima bantuan sangat terbantu dan merasa sejahtera karena dengan bantuan yang didapat mampu membiayai pendidikan anak hingga ke jenjang yang lebih tinggi dan harapan taraf kehidupan anak-anak KPM lebih terjamin, dimana hal ini sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yaitu meningkatkan taraf hidup melalui layanan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Aminudin, N. (2018). The family hope program using AHP method. *International Journal of Engineering and Technology(UAE)*, 7(2), 188–193. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.12.15917>
- ARDA, I. Z. (2022). *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU (STUDI PADA BIDANG PENDIDIKAN DI NAGARI PANGKALAN KOTO BARU) SUMATERA BARAT*. Universitas Islam Riau.
- Emery, M. A. (2019). Members of the same pharmacological family are not alike: Different opioids, different consequences, hope for the opioid crisis? *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 92, 428–449. <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.02.010>
- Feldman, D. B. (2018). Does Family Cohesion Predict Children’s Effort? The Mediating Roles of Sense of Coherence, Hope, and Loneliness. *Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 152(5), 276–289. <https://doi.org/10.1080/00223980.2018.1447434>
- Garza, K. (2018). Automated Insulin Delivery Systems: Hopes and Expectations of Family Members. *Diabetes Technology and Therapeutics*, 20(3), 222–228. <https://doi.org/10.1089/dia.2017.0301>
- Harini, R. (2020). Agricultural resource potential for improving food security and community welfare in Penimbun Village, Karanggayam, Kebumen, Central Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012041>
- Jiang, Y. (2022). Gratitude and hope relate to adolescent nonsuicidal self-injury: Mediation through self-compassion and family and school experiences. *Current Psychology*, 41(2), 935–942. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00624-4>

- Kaswanto, R. (2018). Management of landscape services for improving community welfare in West Java, Indonesia. *Landscape Ecology for Sustainable Society*, 251–270. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74328-8_15
- Kurniadi, R. (2020). Social forestry for improving environmental quality and community welfare: A case study of Pantar Island, Alor, East Nusa Tenggara Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 487(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/487/1/012013>
- Kusumah, W. (2022). Improving skills and welfare of cilame village communities through massage training. *AIP Conference Proceedings*, 2468. <https://doi.org/10.1063/5.0104796>
- Lubis, A. I. F. (2018). Strategy for improving science and welfare through community empowerment technology. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9), 1036–1046.
- Manero-Rupérez, N. (2020). The Galectin Family as Molecular Targets: Hopes for Defeating Pancreatic Cancer. *Cells*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/cells9030689>
- Muin, R., & Rosdiana, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan Di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i2.1844>
- Nouzari, R. (2019). Post-traumatic growth among family caregivers of cancer patients and its association with social support and hope. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 7(4), 319–328. <https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2019.73959.0>
- Nurfia, C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan Di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul). In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11, pp. 951–952).
- Ooms, T. (2019). The Evolution of Family Policy: Lessons Learned, Challenges, and Hopes for the Future. *Journal of Family Theory and Review*, 11(1), 18–38. <https://doi.org/10.1111/jftr.12316>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. (2018).
- Purwowibowo. (2023). Improving Community Welfare Through the Cultivation of Coffee: A Case Study of Bondowoso's Coffee Republic, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(2), 315–322. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0051>
- Rulloh, S. A. (2020). The role of social capital in improving community welfare in East Java, Indonesia. *Opcion*, 36, 332–349.
- Saharuddin. (2021). Improving the welfare of the poor with quality assistants and quality of the family hope program (PKH) in community empowerment in Makassar city. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3681–3688.

-
- Sidabutar, Y. F. D. (2021). Maritime Potential Phenomenon in Improving the Welfare of the Riau Island Community. *E3S Web of Conferences*, 324. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132408001>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Sugiyono, Ed.). Alfabeta.
- Suka, A. P. (2020). Sources of income from HTR areas in Boalemo: No single policy for improving welfare of the communities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 487(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/487/1/012012>
- Suryamin. (2015). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015* (S. Ali & L. E.W, Eds.). <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/c39e6-inkesra-2015.pdf>
- Turismo, B. E. (2021). ANALYSIS OF THE ROLE MODEL OF COASTAL AREA ARRANGEMENT ON IMPROVING COMMUNITY WELFARE THROUGH LEGAL PERSPECTIVE. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(6), 1–19.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. (2009).
- Untung, B. (2021). IMPROVING POOR COMMUNITY WELFARE THROUGH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(7), 1–26.
- Xiang, G. (2022). Links between family cohesion and subjective well-being in adolescents and early adults: The mediating role of self-concept clarity and hope. *Current Psychology*, 41(1), 76–85. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00795-0>
- Yang, Y. (2020). Hope and Creative Self-Efficacy as Sequential Mediators in the Relationship Between Family Socioeconomic Status and Creativity. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00438>